

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan hukum. Sesuai dengan penjelasan Konstitusi tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Hukum memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan masyarakat di Indonesia karena berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan orang lain. Semua aspek kehidupan dalam sebuah masyarakat, bangsa, dan negara diarahkan oleh hukum dalam negara yang berdasarkan hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat dan memastikan bahwa semua orang berperilaku sesuai dengan norma-norma umum. Fakta-fakta tidak hanya menjaga apa yang baik dalam masyarakat, tetapi juga bisa mengubah hal-hal. Tugas hukum melibatkan menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai kebutuhan individu. Tujuannya adalah agar berbagai kepentingan tersebut dapat bekerja sama daripada bersaing satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini, perlu menetapkan batasan dan perlindungan atas berbagai kepentingan tersebut, yang akan diatur oleh hukum. Meskipun ada undang-undang yang mengatur semua perilaku dan tindakan, masih ada kejahatan di negara ini. (Bender, 2016)

Keamanan dan ketertiban di dalam suatu desa atau masyarakat memiliki signifikansi yang besar, karena hal ini mencerminkan kondisi keamanan dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Terutama pada desa-desa baru, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sering dihadapkan pada masalah seperti perkelahian, pencurian, dan lain sebagainya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang selalu diinginkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Definisi keamanan dari Rinawani dan Mayarni (2018) menyatakan bahwa keamanan adalah kondisi bebas dari gangguan dan hambatan. Oleh karena itu, masyarakat sangat mengharapkan keamanan dari berbagai bentuk tindakan yang bisa merusak

kehidupan bersama, baik dari perorangan maupun pihak lain. Kehadiran rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bersama menciptakan harmoni di masyarakat dan, yang tak kalah penting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, jika masyarakat menghadapi situasi yang tidak aman, hal ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan bersama, mempengaruhi tingkat kesejahteraan, dan menciptakan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Situasi ini seringkali berujung pada kerugian berupa korban jiwa, harta benda, serta berbagai fasilitas dan infrastruktur yang hancur akibat ketidakamanan..

Tugas kita semua untuk menjaga perdamaian dan ketenangan di komunitas-komunitas di seluruh dunia guna melawan risiko dan gangguan seperti kegiatan kriminal dan konflik sosial. Perhatian terhadap bidang pertahanan dan keamanan sangat penting karena berkaitan dengan harapan masyarakat akan perlindungan dan kewajiban yang dimiliki oleh institusi negara. Oleh karena itu, saat memberikan pelayanan kepada penduduk, sebuah negara atau pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyediakan keamanan, kepastian, dan ketenangan. Untuk melindungi penduduk dari risiko dan gangguan, pemerintah juga harus menyebarkan program-program pengembangan komunitas yang bersumber dari dalam, seperti konflik antar kelompok, perbedaan suku, agama, dan juga ancaman dari luar seperti kejahatan, terorisme, serta bentuk kekerasan lainnya. Dalam kata-kata lain, orang menginginkan lingkungan yang aman dan tentram, serta sistem penanganan kejahatan yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi masyarakat dalam proses menegakkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah sangat penting. Saat ini, dalam era otonomi, adalah penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam membangun perdamaian dan stabilitas. Otonomi lokal memungkinkan otonomi dan perlindungan perdamaian serta stabilitas komunitas. Tidak diragukan lagi bahwa partisipasi aktif dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai ketenangan dan keamanan ini. Oleh karena itu, salah satu variabel utama yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah partisipasi publik.

Unsur pemerintahan paling dasar dalam membina dan menjaga ketertiban masyarakat adalah tingkat terendah, yaitu kelurahan. Menurut ketentuan undang-

undang, desa-desa yang berada di bawah pengawasan seorang kepala desa memiliki tanggung jawab penting dalam mempromosikan keamanan warga negara. Hal ini terlihat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, melaksanakan proyek-proyek pembangunan, membangun komunitas desa, memberikan wewenang untuk Memastikan keamanan dan stabilitas komunitas di wilayah tersebut, yang menghadapi berbagai resiko dan gangguan, termasuk kejahatan dan konflik sosial. Perhatian terhadap industri pertahanan dan keamanan sangat penting karena terkait dengan harapan penduduk terkait jaminan keamanan dan ketertiban, serta tanggung jawab lembaga pemerintah. Ancaman bisa bersifat internal, seperti konflik antar kampung, antar suku, dan agama, atau juga bersifat eksternal, seperti kejahatan dan terorisme, serta bentuk kekerasan lainnya. Dengan kata lain, masyarakat memerlukan kondisi keamanan dan ketertiban yang menciptakan suasana yang kondusif, juga perlakuan yang baik terhadap masalah kriminalitas. Untuk mencapai hal tersebut, partisipasi aktif dari masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan dalam proses menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam menangani permasalahan mengenai Kamtibmas yang berada di desa, Peran para walikota sangat penting dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Desa, khususnya dalam Pasal 26 ayat 4, yang memberikan tanggung jawab kepada para walikota untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di masyarakat mereka. Masyarakat dapat meminta perlindungan hukum dari kepala desa jika ada hal yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Adanya kenyamanan dan ketertiban adalah keinginan masyarakat, namun sebaliknya, jika keamanan terganggu, ini akan berdampak negatif pada tatanan kehidupan bersama dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan. Kepala desa memainkan peran penting dalam menjaga Kamtibmas dengan melibatkan berbagai elemen, seperti Babinsa, linmas, dan unsur masyarakat. Masyarakat desa juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga semua pihak merasa yakin terhadap tindakan yang merusak tatanan kehidupan bersama. Berdasarkan pasal 13 yang mengatur tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan lokal

di bidang kemasyarakatan desa meliputi beberapa hal, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah serta masyarakat desa, memelihara kerukunan warga masyarakat desa, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa. Selain itu, kewenangan lokal juga mencakup upaya melestarikan dan mengembangkan semangat gotong royong dalam masyarakat desa.

Saat ini, telah terjadi serangkaian peristiwa yang secara efektif mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Ini termasuk kejahatan seperti serangan, pencurian, pelecehan di sekolah, pornografi, dan perilaku ilegal oleh para pemuda, serta konflik perdata yang berkaitan dengan properti dan berbagai perbedaan pendapat yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan komunitas. Fungsi administrasi komunitas harus ditingkatkan secara signifikan untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap keamanan publik. Pada awalnya, hal ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam komunitas serta memastikan bahwa masalah-masalah yang telah diatasi sebelumnya tidak terulang, dan agar administrasi dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap situasi serupa. Implementasi hukum dan otoritas sistem peradilan bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat. Karena komunitas memiliki dampak signifikan pada keamanan dan stabilitas, sangat penting bagi individu untuk sadar akan hukum. Siskamling, juga dikenal sebagai sistem keamanan lingkungan, merupakan tempat di mana orang dapat berpartisipasi dalam penyebaran keadilan dan mempromosikan supremasi hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan akan lebih efektif. Kompleksitas kejahatan dalam masyarakat, termasuk peningkatan frekuensi kejahatan pencurian, membenarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan sistem perlindungan lingkungan.

Usaha untuk mencapai ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat tidak bisa semata-mata mengandalkan aparat penegak hukum. Faktor jumlah yang terbatas dari aparat ini, serta beragamnya tugas yang harus dilakukan, membuat keterlibatan aktif masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas aparat di lapangan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan warga memainkan peran yang signifikan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi aparat. Perilaku menyimpang yang

dilakukan oleh anggota masyarakat perlu mendapat perhatian serius, karena hal tersebut bisa berdampak pada ketidakamanan, merusak nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah atau negara adalah memberikan rasa aman, kepastian, dan jaminan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai ancaman dan gangguan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kerjasama aktif antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama. Sumber daya yang terbatas harus diarahkan dengan efisien, dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan adalah faktor penting dalam proses ini.

Akar dari masalah Kamtibmas pada dasarnya terletak pada dinamika masyarakat dari berbagai aspek, seperti ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Pada tahap tertentu, gangguan dalam Kamtibmas dapat berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Dengan penambahan jumlah penduduk, urbanisasi, modernisasi, dan kemajuan pembangunan lainnya, juga akan membawa perkembangan dalam hal kualitas dan jumlah gangguan Kamtibmas. Kepolisian memiliki tanggung jawab dan fungsi utama untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, melindungi dari bahaya yang mungkin muncul akibat dampak negatif pembangunan, serta mengatasi ancaman dari individu lain. Tanggung jawab ini dilaksanakan dengan cara preventif, represif, dan juga pre-emptif, yang diemban oleh berbagai fungsi yang ada dalam lembaga kepolisian.

Fenomena yang terjadi di tempat penulis terjadi di Desa Buwek yang semuanya berada di kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, melihat banyaknya permasalahan yang ada di desa desa yang ada di kabupaten Lumajang khususnya di desa Buwek yang dituju penulis untuk melakukan penelitian, mengenai kriminalitas yang tentunya sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tiga desa ini menghadapi berbagai permasalahan serius, terutama dalam hal tindak kriminalitas yang tinggi, seperti pencurian hewan ternak, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan perkelahian yang berujung pada hilangnya nyawa karena faktor narkoba. Hal ini terefleksikan melalui liputan berita yang

mencatat berbagai insiden di desa Randuagung, misalnya kasus tiga pemuda yang ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu (dilaporkan oleh Faktual News), Kejadian perampokan pada siang hari di desa yang telah diselesaikan oleh polisi Lumajang (menurut berita Lumajang Satu), dan penahanan seorang anak pejabat desa tingkat menengah yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu (menurut BeritaJatim.com). Dalam upaya mengatasi masalah ini, Kapolres Lumajang telah meluncurkan sebuah program yang dikenal sebagai SKD (Satgas Keamanan Desa). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan di desa-desa tersebut.

Tugas yang diemban oleh Satgas Keamanan Desa adalah menjaga serta memastikan keamanan dalam wilayah desa. Bahkan, mereka memiliki hak untuk membubarkan aktivitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan mabuk-mabukan. Selain itu, anggota dari Satgas Keamanan Desa juga memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam desa, seperti menangani konflik antar warga atau bersama-sama berkolaborasi dalam mengatasi bencana alam dan masalah sosial lainnya. Keanggotaan dalam Satgas Keamanan Desa berada di bawah pengawasan langsung kepala desa, dan mereka mendapatkan arahan serta bimbingan periodik dari Bhabinkamtibmas. Melalui kerja keras dan tanggung jawab yang mereka emban, anggota Satgas Keamanan Desa secara tidak langsung memperoleh peran sebagai Tokoh Masyarakat dalam wilayah mereka.

Hal ini kapolres melihat latar belakang desa yang sering terjadi akan tindak kriminalitas di desa desa Kabupaten Lumajang yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat. Kapolres Lumajang menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki beragam pola pengamanan yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan topografi daerah tersebut. Kabaharkam Mabes Polri sampai turun langsung memberikan Arahan terhadap SKD bentukan kapolres Lumajang ini. Beliau menuturkan “ SKD ini membantu pemerintah baik di RT/RW dan dusun di desa masing masing. menciptakan kondisi damai dan aman” Keberadaan anggota Satuan Keamanan Desa (SKD) bertujuan untuk memberikan perasaan aman dan damai kepada masyarakat. Peran SKD ini memiliki signifikansi yang besar, bukan hanya dalam mencegah tindakan pencurian atau kejahatan, melainkan juga dalam mengelola berbagai faktor yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (Lumajangsatu.com). tak hanya itu komitmen yang dilakukan oleh

pemerintah kabupaten Lumajang dalam pembentukan Satgas Keamanan Desa ini tak hanya membentuk namun juga memberikan pelatihan dan pendampingan anggota SKD yang akan di turunkan di setiap desa masing masing, Dalam Apel dan pelatihan Akbar yang dilakukan oleh Kapolres, Bupati dan dihadiri oleh Kabaharkam Mabes Polri, Bupati Lumajang mendapatkan penghargaan penghormatan Brahmagola dari Kabaharkam Polri, berkat upayanya dalam mendukung menciptakan pemeliharaan Kamtibmas yang baik melalui Satgas Kemanan Desa (TVOne.com) SKD telah mendirikan tiga portal yang diawasi oleh anggota satuan tugas (satgas). Pengunjung dari luar daerah akan diantar hingga sampai ke tujuan mereka. SKD telah menjadi model bagi Indonesia, menjadi contoh yang baik tentang bagaimana suatu sistem pencegahan kejahatan yang berjalan dengan efektif. Para anggota satgas adalah warga yang secara sukarela muncul karena dorongan hati nurani mereka untuk membantu menjaga keamanan desa (Beritasatu). Di desa buwek yang menjadi tempat penelitian penulis, SKD ini sangat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat, tidak hanya tindak kriminalitas, Anak-anak yang sering nongkrong tengah malam sambil minum-minuman keras juga ditindak oleh SKD hal ini juga merupakan bentuk tugas dari SKD

Sesuai keputusan Kepala Desa buwek Nomor:188.45/.../427.98.10/2020 tentang pembentukan Anggota SKD di desa Buwek Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang,menetapkan Satuan Keamanan Desa (SKD) di desa Buwek dengan keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh kapolres lumajang, adapun tugas tugas Satgas Keamanan Desa di antara lainnya, membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dalam skala desa atau kelurahan, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari semua desa di Kabupaten Lumajang, Desa ini memiliki satgas keamanan desa dengan personil terbanyak dari desa-desa lainnya, Desa Buwek 47 Anggota. Walaupun SKD tidak memiliki gaji dan hanya bentuk sukarelawan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangatlah tinggi, hal ini tidak serta merta terjadi, adanya dorongan dari kepala desa yang bisa mempengaruhi dan sangat mengapresiasi adanya program satgas keamanan desa ini.

Berdasarkan dari fenomena di atas fokus penelitian mengenai Implementasi Satgas Keamanan Desa (SKD) Dalam Kamtibmas Di Desa Buwek, bagi penulis fenomena ini penting dikaji, penulis menduga implementasi program SKD belum terlalu maksimal *di desa buwek*. Maka dari itu penulis membuat judul tentang “ Implementasi Satgas Keamanan Desa (SKD) Dalam Kamtibmas Di Desa Buwek ”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Satgas Keamanan Desa (SKD) dalam Kamtibmas Di Desa Buwek ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan Implementasi Satgas keamanan Desa dalam Kamtibmas *di desa buwek*.
- b. Untuk mendeskripsikan Faktor penghambat Implementasi Satgas Keamanan Desa dalam Kamtibmas di Desa Buwek

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini mampu memberikan nilai tambah atau sumbangan pada perkembangan pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu pemerintahan. Dengan demikian referensi terkait Implementasi Satgas Keamanan Desa dalam Kamtibmas di tiga Desa.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif pada masyarakat dengan memberikan kemampuan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) desa dan mencerminkan aspirasi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan mereka untuk menciptakan desa sesuai dengan harapan mereka.

- c. Manfaat Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai latihan dalam proses penelitian dan mengetahui tentang Implementasi Satgas Keamanan Desa dalam Kamtibmas di tiga Desa yang terjadi di tempat penulis.